

LAPORAN KINERJA

KETUA BAWASLU MAMUJU TENGAH

Triwulan 2
2024



LAPORAN KINERJA KETUA BAWASLU MAMUJU TENGAH

Triwulan 2
2024

PADA PEMILU



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Triwulan 2 Ketua merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana yang dilaksanakan pada Triwulan 2 Tahun 2024 yang akan dijadikan patokan Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024. Laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, laporan kinerja juga digunakan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Triwulan 2 Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas Pemilu tingkat kabupaten atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini menjadi media penilaian kinerja secara kuantitatif dan merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju *Good Governance*, serta sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai wujud transparansi kinerja hingga pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kepada publik.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 Tiwulan 2 sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan nampak masih perlu mendapat perhatian serius serta diperlukan

dukungan dari semua pihak agar pencapaian tujuan lembaga untuk “*Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya*” dapat terlaksana dengan baik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 2 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Mamuju Tengah, 31 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KETUA,**

RAHMAT MUHAMMAD

RINGKASAN EKSEKUTIF

Meskipun Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2024 berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024, tetapi pelaksanaan tahapan Pemilu belum sepenuhnya selesai, terutama untuk Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi yang sementara berjalan dan Tahapan Pengucapan Sumapng Janji Calon Terpilih yang akan dilaksanakan di triwulan 3 dan 4. Total 5 (lima) Daerah Kecamatan telah melaksanakan Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan baik termasuk Daerah dibawahnya. Sekitar Kurang Lebih 94.309 Jumlah Pemilih Tetap sudah melakukan Pemilihan Presiden dan Wapres, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD di 514 TPS yang menyebar di Kabupaten Mamuju Tengah. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah turut hadir dan memberikan peran yang signifikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sebagai garda terdepan dalam Pengawasan setiap Tahapan Pemilu Tahun 2024 agar dapat dilaksanakan secara demokratis, Bermartabat dan Berkualitas sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka mewujudkan visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya” tidak lepas dari adanya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terarah dan terencana. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc tidak lepas dari adanya indikator yang mendukung didalamnya yaitu terdapat 5 (lima) daerah yang dapat diakui yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi serta penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota yang sudah mencapai 95% Pada Tahapan Pemilu Tahun 2024 sedangkan Tahapan Pilkada direncanakan dapat diakui pada Triwulan 3 Tahun 2024.

Kegiatan-kegiatan Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pelaksanaan Program yang sebagian besar termasuk dalam Program Nasional pada Program CQ (Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu) yang tidak lepas dari pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada setiap Tahapannya.

Berdasarkan hal tersebut, Berikut Berikut Realisasi Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 2 Tahun 2024.

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi s.d. TW 2 | Progres s.d. TW 2 (%) |
|--|--|--------|---------------------|-----------------------|
| Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc | Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi | 6 | 5 | 85 |
| | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota | 100% | 95% | 95% |

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| KATA PENGANTAR..... | I |
| RINGKASAN EKSEKUTIF..... | III |
| DAFTAR ISI | V |
| DAFTAR TABEL..... | VI |
| DAFTAR GAMBAR..... | VII |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | VIII |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN..... | 2 |
| 1.3. TUGAS DAN FUNGSI | 3 |
| 1.4. STRUKTUR ORGANISASI..... | 5 |
| BAB II | 7 |
| DATA ANALISIS CAPAIAN KINERJA..... | 7 |
| 2.1. PERJANJIAN KINERJA | 7 |
| 2.2. PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA PER SASARAN KEGIATAN..... | 8 |
| 2.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN CAPAIAN OUTPUT | 13 |
| A. Alokasi Anggaran dan Realisasi per Indikator Kinerja | 13 |
| B. Alokasi Anggaran per Jenis Belanja | 14 |
| C. Capaian Output..... | 15 |
| BAB III | 17 |
| PENUTUP | 17 |
| 3.1. KESIMPULAN..... | 17 |
| 3.2. SARAN/REKOMENDASI..... | 18 |
| LAMPIRAN | 20 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Progress Capaian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 2 Tahun 2024 | 7 |
| Tabel 2. Capaian dan Progres Kinerja Indikator 1 Ketua Triwulan 2 Tahun 2024..... | 10 |
| Tabel 3. Capaian dan Progres Kinerja Indikator 2 Ketua Triwulan 2 Tahun 2024..... | 12 |
| Tabel 6. Pagu dan Realisasi Indikator Kinerja Ketua Triwulan 2 Tahun 2024 | 13 |
| Tabel 7. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Maret 2024 | 14 |
| Tabel 8. Capaian Output Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 2 Tahun 2024 | 15 |
| Tabel 9. Capaian dan Progres Indikator Kinerja Ketua Triwulan 2 Tahun 2024 | 17 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|---|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe B | 5 |
| Gambar 2. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024..... | 6 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----------|
| Lampiran 1. Rencana Aksi Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 | 21 |
| Lampiran 2. Data Evaluasi Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 2 Tahun 2024 | 31 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Triwulan 2 tahun 2024 ini disusun sebagai bagian dari komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu yang bersih, jujur, adil, dan demokratis, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kondisi geografis yang beragam, serta dinamika politik dan sosial di masyarakat merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan.

Pada Triwulan 2 tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mendukung pengawasan Pemilu. Kegiatan-kegiatan ini mencakup pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, Bawaslu juga berupaya untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu melalui berbagai program dan kegiatan sosialisasi.

Latar belakang penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat selama Triwulan 2 tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi dan refleksi atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan menyusun laporan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu, serta berupaya untuk memberikan kontribusi yang positif dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkualitas di Provinsi Sulawesi Barat.

1.2. MAKSDUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dari pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kegiatan teknis pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan Badan Ad-Hoc se Kabupaten Mamuju Tengah. Pembahasan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan cakupan pengawasan yang dilakukan di berbagai daerah, serta untuk memastikan bahwa semua tahapan Pemilu/Pilkada diawasi dengan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

B. Tujuan

1) Menilai cakupan pengawasan:

- Menilai sejauh mana kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada telah dilaksanakan di seluruh wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengidentifikasi daerah yang telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan regulasi dan yang memerlukan perhatian lebih.

2) Mengevaluasi efektivitas pengawasan:

- Menilai sejauh mana kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada telah dilaksanakan di seluruh Wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengidentifikasi daerah yang telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan regulasi dan yang memerlukan perhatian lebih.

3) Mengidentifikasi tantangan dan kendala:

- Menilai sejauh mana kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada telah dilaksanakan di seluruh wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengidentifikasi daerah yang telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan regulasi dan yang memerlukan perhatian lebih.

4) Memberikan rekomendasi perbaikan:

- Menilai sejauh mana kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada telah dilaksanakan di seluruh wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah.

- Mengidentifikasi daerah yang telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan regulasi dan yang memerlukan perhatian lebih.
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas:
- Menilai sejauh mana kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada telah dilaksanakan di seluruh wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah.
 - Mengidentifikasi daerah yang telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan regulasi dan yang memerlukan perhatian lebih..

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

- A. Tugas Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
- 1) Mengawasi penyelenggaraan pemilu:
 - 2) Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
 - 3) Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu:
 - 5) Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
 - 6) Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) Menindak pelanggaran pemilu:
 - 8) Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
 - 9) Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 10)Menjaga independensi dan netralitas:
 - 11)Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.

12) Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi Bawaslu Provinsi

1) Fungsi Pengawasan

- Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah provinsi, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
- Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi Pencegahan

- Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah provinsi, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
- Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Fungsi Penindakan

- Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah provinsi, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
- Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Fungsi Koordinasi

- Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah provinsi, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
- Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

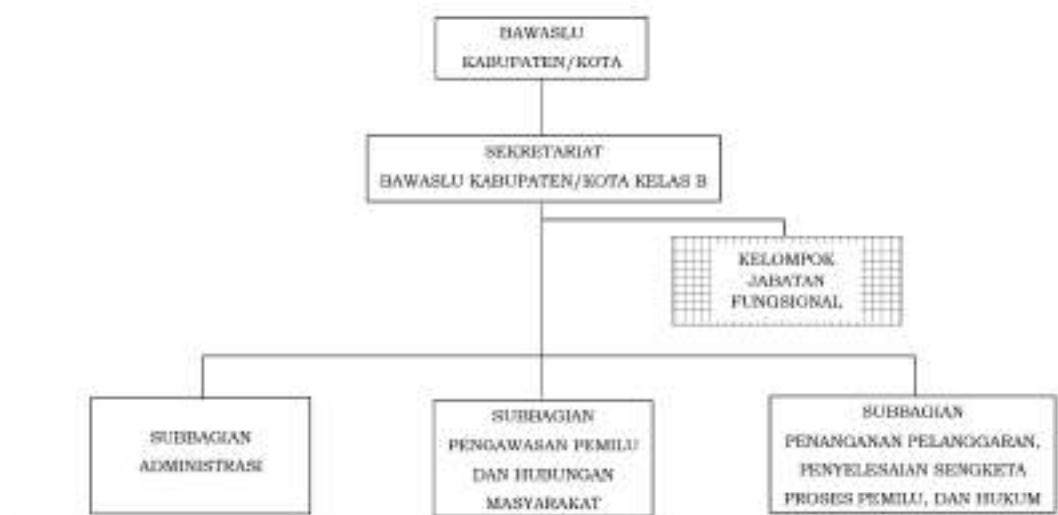
5) Fungsi Penyelesaian Sengketa

- Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah provinsi, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.

- Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Fungsi Evaluasi dan Pelaporan
- Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah provinsi, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
 - Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

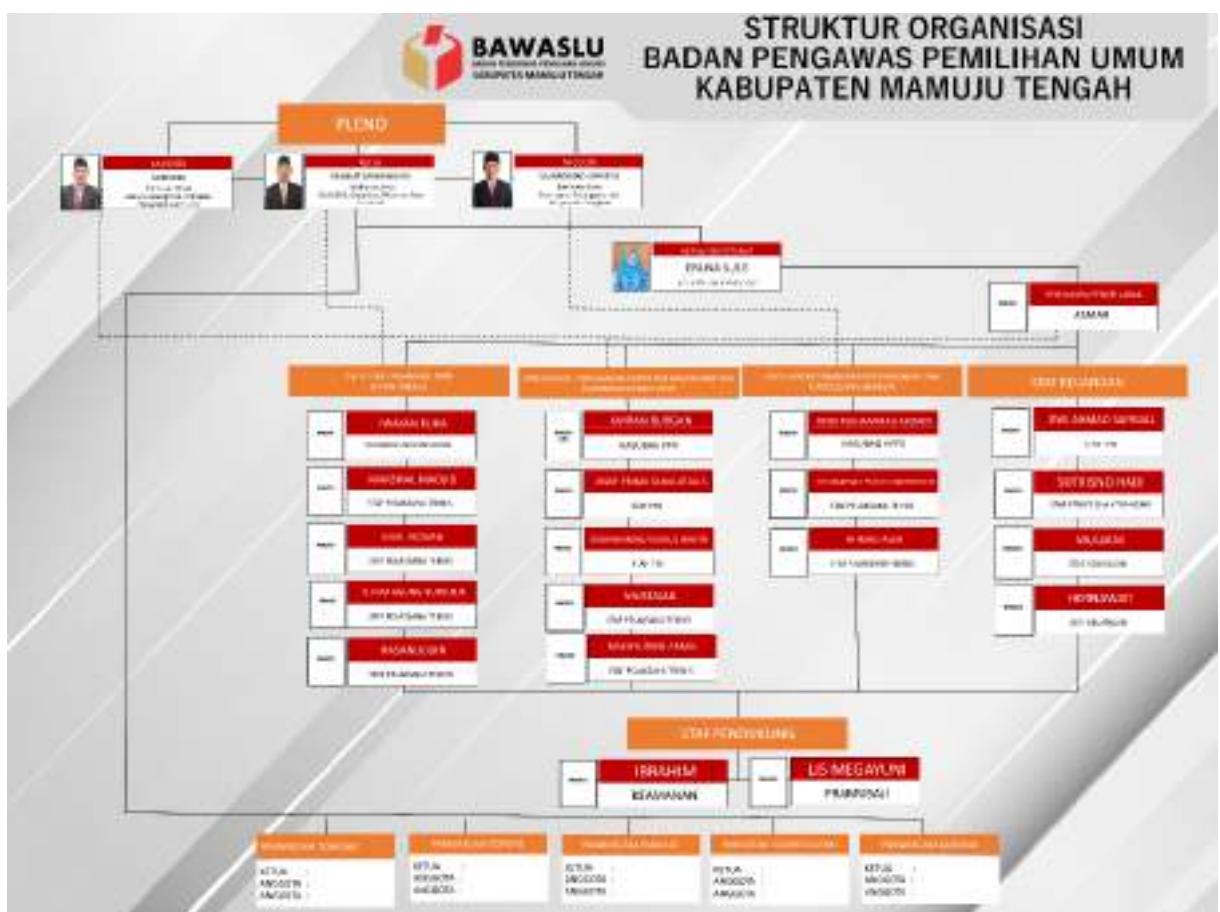
Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah berdasar pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Hal tersebut menjadikan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah termasuk pada jenis komisioner berjumlah 3 orang yaitu Ketua dan 2 Anggota dengan didukung oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kelas B dengan Sub Bagian Administrasi, Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat dan Subbagian Penanganan Pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Hukum. Berikut Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe B

(Sumber : Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2023)

Berdasarkan Struktur tersebut, disusunlah Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai berikut



Gambar 2. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

BAB II

DATA ANALISIS CAPAIAN KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Jadi, Perjanjian kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah merupakan dokumen yang berisikan kontrak kerja dari Bawaslu Republik Indonesia kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja Ketua merupakan dokumen komitmen Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjalankan amanah yang diberikan Bawaslu Republik Indonesia untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Ketua dan Anggota yang berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja Ketua menjadi tolok ukur atas kinerja lembaga, bahan evaluasi kinerja, dan sebagai dasar Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah. Selain itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah periode tahun 2024 serta dapat menjadi dasar penetapan sasaran kinerja pegawai. Adapun Capaian Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 2 Tahun 2024 oleh adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Progress Capaian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 2 Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi s.d. TW 2 | Progres s.d. TW 2 (%) |
|---|--|--------|------------------------|--------------------------|
| Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc | Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi | 6 | 5 | 85 |
| | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota | 100% | 90% | 90 |

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

2.2. PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA PER SASARAN KEGIATAN

Untuk menentukan Pencapaian kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, terlebih dahulu harus ditentukan sasaran Kegiatan yang menjadi indikator penilaian pada komponen komponen pada Petunjuk Operasional Kerja (POK) yang sudah disusun dengan memperhatikan progres Output dan Capaian Output yang berjalan pada Triwulan 2 untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian pada Indikator terkait. Berikut akan dijelaskan secara rinci capaian kinerja per sasaran kegiatan pada Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 2 tahun 2024.

| SASARAN 1 | |
|---|--------------------------------|
| Sasaran Strategis | Capaian |
| Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc | 90% |
| INDIKATOR 1 | |
| Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaran Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi | |
| Target : 6 | Realisasi : 5 Presentase : 85% |

Pengawasan Pemilu/Pilkada merupakan salah satu tugas utama Bawaslu yang bertujuan untuk memastikan setiap tahapan Pemilu/Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan teknis pengawasan ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, Badan AdHoc yang meliputi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS se Kabupaten Mamuju Tengah. Pada Triwulan 2 tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan berbagai kegiatan teknis pengawasan di seluruh daerah di provinsi ini.

Capaian Jumlah Daerah pada Triwulan 2 tahun 2024, jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan Pemilu/Pilkada di bawah pengawasan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai selesai Tahapan Pemilu/Pilkada Tahun 2024 sehingga Output yang dapat diakui mencapai 5 (Lima) Daerah yang meliputi:

- 1) Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah yang meliputi Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Karossa, Kecamatan Pangale,

Kecamatan Tobadak, Kecamatan Tobadak melaksanakan kegiatan teknis pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2) Kegiatan Teknis Pengawasan yang dijalankan meliputi :

- Pengawasan Pendaftaran Pemilih;
- Pengawasan Pencalonan:
- Pengawasan Kampanye:
- Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara:
- Pengawasan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

3) Tantangan dan Kendala

- Keterbatasan Sumber Daya
- Kondisi Geografis

Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc sejatinya ditentukan oleh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing posisi dalam menjalankan pengawasan Penyenggaraan Pemilu Tahun 2024 karena baik dari DKPP, KPU dalam Hal ini KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah punya tugas fungsi masing-masing dan harus bersinergi. Jumlah Daerah yang dapat diakui/diklaim melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Regulasi adalah sebanyak 5 (lima) Daerah yaitu Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Karossa, Kecamatan Pangale, Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Topoyo yang meliputi Panwaslu kecamatannya, Panwaslu Kelurahan Desa dan Pengawas TPS pada masing-masing kecamatan se-Kabupaten Mamuju Tengah.

Hal ini berdasarkan pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang sudah berjalan yang meliputi Pengawasan Masa Kampanye Pemilu, Pengawasan Masa Tenang, Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Pengawasan Logistik yang telah dilakukan dengan Baik Oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Sementara itu, Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Belum sepenuhnya diselesaikan Terutama pada Pengawasan Distribusi Logistik, Pengawasan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, serta Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD. Belum Lagi

jika Ternyata jika diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Perhitungan Surat Suara Ulang (PSSU) berdasarkan putusan MK yang sedang berjalan. Hal ini menyebabkan 1 Daerah yaitu Kabupaten Mamuju Tengah sendiri belum dapat diakui sudah tercapai.

Perlu Diketahui bahwa Capaian Kinerja yang sudah diakui pada Indikator 1 Ini baru mencakup pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Sementara itu Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 sudah dapat dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dikarenakan Tahapan sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tetapi pengakuan Output baru akan dilaksanakan pada Triwulan 3 agar selaras dengan capaian anggaran Hibah, tetapi telah dilakukan perencanaan Program dan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai sumber pembiayaan utama penyelenggaraan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024. Pada periode ini juga sudah dibentuk Badan Ad-Hoc di Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Panwaslu Kecamatan dan sementara sedang berlangsung pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Mamuju Tengah. Berikut Capaian dan Progres Kinerja Indikator 1 Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 2 Tahun 2024.

Tabel 2. Capaian dan Progres Kinerja Indikator 1 Ketua Triwulan 2 Tahun 2024

| Indikator Kinerja Kegiatan | Capaian Kinerja TW 1 | | Progres TW 1 |
|---|----------------------|-----------|--------------|
| | Target | Realisasi | |
| Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaran Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi | 6 | 5 | 85% |

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

| SASARAN 1 | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|------------------|----------|------------|-------------------|----------|------------|
| Sasaran Strategis | Capaian | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc | 90% | | | | | | | |
| INDIKATOR 2 | | | | | | | | |
| Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota | | | | | | | | |
| Target | : | 100% | Realisasi | : | 95% | Presentase | : | 95% |

Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah serta Badan Adhoc baik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS se-Kabupaten Mamuju Tengah sudah dilaksanakan dengan realisasi 95% yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan Fungsi Utama Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dengan rincian :

1. Pengawasan Logistik dan Distribusi Logistik meliputi :
 - Pengawasan Perencanaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu;
 - Pengawasan Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu;
 - Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu;
2. Pengawasan Masa Kampanye Meliputi :
 - Pengawasan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu;
 - Materi Kampanye Pemilu; dan
 - Pelaksanaan metode Kampanye Pemilu
3. Pengawasan Masa Tenang dalam hal melakukan patroli Pengawasan Masa Tenang dan Apel Siaga
4. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Meliputi :
 - Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara
 - Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara
 - Pengawasan Persiapan Perhitungan Suara
 - Pengawasan Pelaksanaan Perhitungan Suara
5. Pengawasan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Makhkamah Konsitusi yang sementara Berjalan

Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan yang berjalan belum dihitung pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 sehingga output tidak bisa di klaim 100%, dimungkinkan akan dilakukan perubahan Capaian Output dan Progress sesuai dengan pelaksanaan Tahapan Pilkada Tahun 2024. Berdasarkan Hal tersebut, Pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah pada Triwulan 2 Tahun 2024 dilaksanakan sebesar 90% dengan rincian Capaian dan Progres Kinerja Indikator 2 Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 2 Tahun 2024 Sebagai Berikut :

Tabel 3. Capaian dan Progres Kinerja Indikator 2 Ketua Triwulan 2 Tahun 2024

| Indikator Kinerja Kegiatan | Capaian Kinerja s.d TW 2 | | Progres s.d TW 2 |
|---|--------------------------|-----------|---------------------|
| | Target | Realisasi | |
| Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota | 100% | 95% | 95% |

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

2.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN CAPAIAN OUTPUT

A. Alokasi Anggaran dan Realisasi per Indikator Kinerja

Berdasarkan Realisasi pada FA Detail SAKTI per 30 Juni 2024 secara akrual disajikan Anggaran dan Realisasi per Indikator Kinerja dengan memperhatikan setiap Komponen yang mendukung Indikator Ketua dan Mengelompokkannya. Setiap Realisasi yang ditampilkan bisa terdiri dari Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52) dan Belanja Modal (53), per 30 Juni 2024 belum ada Belanja Hibah dikarenakan sedang dilakukan Revisi Penambahan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang sementara berjalan. Secara Umum Pagu dan Realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 2 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Pagu dan Realisasi Indikator Kinerja Ketua Triwulan 2 Tahun 2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|--|---------------|----------------|
| Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc | Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi | 30,023,000 | 13,882,705 |
| | Percentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota | 3,735,589,000 | 2,420,171,541 |

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

B. Alokasi Anggaran per Jenis Belanja

Berdasarkan Realisasi pada OM SPAN per 30 Juni 2024 secara Kas disajikan Alokasi Anggaran per Jenis Belanja pada APBN Tahun 2024. Setiap Realisasi yang ditampilkan bisa terdiri dari Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52) dan Belanja Modal (53) yang disandingkan dengan Rencana Penarikan Dana Bulanan.

Per 30 Juni 2024 belum ada Belanja Hibah dikarenakan Belum dilakukan Revisi Penambahan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024. Secara Umum Alokasi Anggaran per Jenis Belanja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Maret 2024

| Jenis Belanja | Pagu | RPD s.d. TW 2 | Realisasi s.d. TW 2 | % | GAP |
|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|
| Belanja Pegawai | 1,286,087,000 | 974,276,000 | 751,356,972 | 58.42% | -0.23 |
| Belanja Barang | 6,592,539,000 | 4,474,456,000 | 4,586,513,245 | 69.57% | 0.03 |
| Belanja Modal | 244,309,000 | 197,349,000 | 91,086,000 | 37.28% | -0.54 |
| Total | 8,122,935,000 | 5,646,081,000 | 5,428,956,217 | 66.83% | -0.04 |

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

C. Capaian Output

Tabel 6. Capaian Output Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 2 Tahun 2024

| Program/Kegiatan/ Rincian Output | RO PN/tidak | Target | Satuan | Capaian Target | | Anggaran (ribu rupiah) | Realisasi Anggaran | | | | | |
|---|----------------|--------|---------|----------------|-----|---------------------------|--------------------|-------|--|--|--|--|
| | | | | (angka) | (%) | | (ribu rupiah) | (%) | | | | |
| 5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | |
| BAH Pelayanan Publik Lainnya | | | | | | | | | | | | |
| 001 Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota | Bukan PN | 2 | Layanan | 1 | 50 | 8,573 | 3,728 | 43.49 | | | | |
| BKC Pemantauan lembaga | | | | | | | | | | | | |
| 001 Laporan Hasil Pencegahan/Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota | Bukan PN | 5 | Laporan | 2 | 50 | 21,450 | 10,154 | 47.34 | | | | |
| 6661 Perencanaan, Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu | | | | | | | | | | | | |
| QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga | | | | | | | | | | | | |
| 001 Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu | PN | 10 | Lembaga | 7 | 85 | 2,527,683 | 1,437,511 | 56.87 | | | | |
| 003 Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc | PN | 54 | Laporan | 54 | 100 | 263,625 | 263,625 | 100 | | | | |
| 6843 Pengawasan Masa Kampanye Pemilu | | | | | | | | | | | | |
| QCE Penanganan Perkara | | | | | | | | | | | | |
| 001 Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye | PN | 4 | Perkara | 4 | 100 | 106,320 | 93,802 | 88.23 | | | | |
| QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga | | | | | | | | | | | | |
| 001 Pengawasan Masa Kampanye | PN | 6 | Laporan | 6 | 100 | 145,159 | 122,897 | 84.66 | | | | |
| 6844 Pengawasan Masa Tenang | | | | | | | | | | | | |
| QCE Penanganan Perkara | | | | | | | | | | | | |
| 001 Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang | PN | 4 | Perkara | 4 | 100 | 59,989 | 44,000 | 73.35 | | | | |
| QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga | | | | | | | | | | | | |
| 001 Pengawasan Masa Tenang | PN | 6 | Laporan | 6 | 100 | 42,280 | 32,625 | 77.16 | | | | |
| 6845 Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara | | | | | | | | | | | | |
| QCE Penanganan Perkara | | | | | | | | | | | | |
| 001 Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara | PN | 3 | Perkara | 3 | 100 | 69,570 | 42,325 | 60.84 | | | | |
| QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga | | | | | | | | | | | | |
| 001 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara | PN | 8 | Laporan | 8 | 100 | 229,010 | 216,475 | 94.53 | | | | |
| 6846 Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu | | | | | | | | | | | | |
| QCE Penanganan Perkara | | | | | | | | | | | | |

| Program/Kegiatan/ Rincian Output | RO PN/tidak | Target | Satuan | Capaian Target | | Anggaran (ribu rupiah) | Realisasi Anggaran | |
|---|----------------|--------|---------|----------------|-----|---------------------------|--------------------|-------|
| | | | | (angka) | (%) | | (ribu rupiah) | (%) |
| 001 Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu | PN | 2 | Perkara | 1 | 50 | 14,493 | 4,455 | 30.74 |
| QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga | | | | | | | | |
| 001 Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu | PN | 5 | Laporan | 2 | 51 | 53,710 | 7,125 | 13.27 |
| 6847 Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga | | | | | | | | |
| 001 Publikasi Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota | PN | 1 | Laporan | 0 | 14 | 11,280 | 0 | 0 |
| QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga | | | | | | | | |
| 002 Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota | PN | 1 | Laporan | 0 | 14 | 18,070 | 0 | 0 |
| 6848 Pengawasan Logistik | | | | | | | | |
| QCE Penanganan Perkara | | | | | | | | |
| 001 Penanganan Pelanggaran Logistik | PN | 2 | Laporan | 2 | 100 | 16,763 | 5,120 | 30.54 |
| QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga | | | | | | | | |
| 001 Pengawasan Logistik | PN | 7 | Laporan | 7 | 100 | 177,637 | 150,211 | 84.56 |

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Pada Triwulan 2 tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan Pemilu sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Beberapa pencapaian utama meliputi:

- 1) Pengawasan Pemilu yang Efektif: Berbagai tahapan Pemilu telah diawasi dengan ketat, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye serta Pengawasan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan proses Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Kerjasama dan Koordinasi yang Baik: Bawaslu telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, termasuk KPU, pemerintah daerah, dan instansi lainnya, guna mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilu yang lebih efektif.

Laporan Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 2 Tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik dari 2 indikator Capaian Kinerja Ketua. Hal ini menjadi sorotan tersendiri dalam melaksanakan Kinerja yang memaksimalkan adanya anggaran dengan tetap memperhatikan efektif efisien. Meskipun demikian, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Realisasi dan Progres Indikator Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 2 Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian dan Progres Indikator Kinerja Ketua Triwulan 2 Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi s.d. TW 1 | Progres s.d. TW 1 (%) |
|--|--|--------|------------------------|-----------------------------|
| Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc | Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi | 6 | 5 | 85 |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi s.d. TW 1 | Progres s.d. TW 1 (%) |
|------------------|--|--------|------------------------|-----------------------------|
| | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota | 100% | 95% | 95% |

3.2. SARAN/REKOMENDASI

Adapun rekomendasi untuk Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah adalah:

- 1) Penambahan Sumber Daya: Diperlukan penambahan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang lebih optimal. Hal ini penting untuk mengatasi keterbatasan yang saat ini dihadapi dan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu.
- 2) Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Penggunaan sistem informasi yang lebih canggih dapat membantu dalam mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan efisiensi kerja.
- 3) Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan media massa, untuk memperkuat pengawasan partisipatif dan mendukung transparansi dalam proses Pemilu.
- 4) Program Sosialisasi dan Edukasi: Mengadakan lebih banyak program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan Pemilu. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dapat membantu mencegah pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pemilu.
- 5) Penguatan Manajemen Internal: Perlu dilakukan penguatan manajemen internal Bawaslu, termasuk peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja, untuk memastikan semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal.
- 6) Dengan mengikuti rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dapat meningkatkan kinerja pengawasannya dan berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan

berkualitas. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Aksi Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Aktifitas | | | REALISASI | | | | | | | | | PAGU | | | |
|----|--|--|---------------------|--------------|-----|---|--------|-----|------|--------|-----|------|--------|------|------|--------|-----|-----------|
| | | | | | | TW 1 | | | TW 2 | | | TW 3 | | | | | | |
| | | | Realisasi Indikator | | | 0 | Daerah | | 0 | Daerah | | 0 | Daerah | | 6 | Daerah | | |
| | | | | | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEPT | OKT | NOV | DES | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc | 1 Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi | 1 | 5245.BAH.001 | 301 | Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4,785,000 |
| | | | 2 | | 302 | Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3,788,000 |
| | | | 3 | 5245.BKC.001 | 301 | Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,466,000 |
| | | | 4 | | 302 | Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7,765,000 |
| | | | 5 | | 303 | Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,025,000 |
| | | | 6 | | 304 | Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4,544,000 |
| | | | 7 | | 305 | Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada | 0 | 0 | ✓ | 0 | 0 | ✓ | 0 | 0 | ✓ | 0 | 0 | ✓ |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Aktifitas | | | REALISASI | | | | | | | | | | PAGU |
|-------------------|--|-------------------|-----------|--|----------------------------|-----------|-----|-----------|------|------|-----------|------|-----|---------------|------|-------------|
| | | | | | | TW 1 | | | TW 2 | | | TW 3 | | | TW 4 | |
| | | | | | disabilitas (Kab./Kota) | | | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja | Realisasi Indikator | 25 Persen | | | 25 Persen | | | 25 Persen | | | 25 Persen | | | 3,735,589,000 | | |
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEPT | OKT | NOV | DES | | | |
| 2 | Percentase pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panawaslu kecamatan, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri | 6661.QIC.001 | 301 | Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,455,000 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,121,000 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,734,000 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,008,000 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,394,000 |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,860,000 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Aktifitas | | REALISASI | | | | | | | | | | PAGU | |
|----|-------------------|-------------------|-----------|----|--------------|--|--|---|------|---|---|------|---|---|------|---------------|
| | | | | | TW 1 | | TW 2 | | TW 3 | | | TW 4 | | | | |
| | | | | 7 | 307 | Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,418,570,000 |
| | | | | 8 | 308 | Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,766,000 |
| | | | | 9 | 401 | Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,275,000 |
| | | | | 10 | 402 | Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,500,000 |
| | | | | 11 | 6661.QIC.003 | 401 | Rekrutmen panwaslu PTPS (Kecamatan) | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,625,000 |
| | | | | 12 | 301 | Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,250,000 |
| | | | | 13 | 6843.QCE.001 | 302 | Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,310,000 |
| | | | | 14 | 303 | Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,625,000 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Aktifitas | | | REALISASI | | | | | | | | | | PAGU | |
|----|-------------------|-------------------|-----------|--------------|-----|--|---|---|------|---|---|------|---|---|------|------|------------|
| | | | | | | TW 1 | | | TW 2 | | | TW 3 | | | TW 4 | | |
| | | | 15 | 6843.QIC.001 | 304 | Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,135,000 |
| | | | 16 | | 301 | Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,632,000 |
| | | | 17 | | 302 | Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,052,000 |
| | | | 18 | | 303 | Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,275,000 |
| | | | 19 | | 401 | Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan) | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,250,000 |
| | | | 20 | | 402 | Pengawasan masa kampanye (Kecamatan) | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,250,000 |
| | | | 21 | | 501 | Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa) | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,700,000 |
| | | | 22 | 6844.QCE.001 | 301 | Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,204,000 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Aktifitas | | REALISASI | | | | | | | | | | | | PAGU |
|----|-------------------|-------------------|--------------|----|-----------|--|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------------|
| | | | | | TW 1 | | | TW 2 | | | TW 3 | | | TW 4 | | | |
| | | | 6844.QIC.001 | 23 | 302 | Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,625,000 |
| | | | | 24 | 303 | Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,275,000 |
| | | | | 25 | 304 | Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,885,000 |
| | | | | 26 | 301 | Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,425,000 |
| | | | | 27 | 302 | Pengawasan masa tenang (Kab./Kota) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,965,000 |
| | | | | 28 | 303 | Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,265,000 |
| | | | | 29 | 401 | Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,125,000 |
| | | | | 30 | 402 | Pengawasan masa tenang (Kecamatan) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300,000 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Aktifitas | | REALISASI | | | | | | | | | | PAGU | |
|----|-------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|------|------------|
| | | | | | TW 1 | | | TW 2 | | | TW 3 | | | TW 4 | | |
| | | | 31 | 6845.QCE.001 | 501 | Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200,000 |
| | | | 32 | | 301 | Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,425,000 |
| | | | 33 | | 302 | Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,870,000 |
| | | | 34 | | 303 | Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,275,000 |
| | | | 35 | | 301 | Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,275,000 |
| | | | 36 | | 302 | Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,725,000 |
| | | | 37 | | 303 | Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,685,000 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Aktifitas | REALISASI | | | | | | | | | | | | PAGU |
|----|-------------------|-------------------|--------------|-----------|-----|--|------|---|---|------|---|---|------|---|---|-------------|
| | | | | TW 1 | | | TW 2 | | | TW 3 | | | TW 4 | | | |
| | | | 6846.QCE.001 | 38 | 401 | Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,125,000 |
| | | | | 39 | 402 | Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300,000 |
| | | | | 40 | 403 | Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan) | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,450,000 |
| | | | | 41 | 501 | Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200,000 |
| | | | | 42 | 601 | Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,250,000 |
| | | | | 43 | 301 | Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota) | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 4,733,000 |
| | | | | 44 | 302 | Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota) | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 9,760,000 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Aktifitas | | | | REALISASI | | | | | | | | PAGU | | |
|----|-------------------|-------------------|-----------|--------------|-----|--|-----------|---|------|---|------|---|------|---|------|------------|------------|
| | | | | | | | TW 1 | | TW 2 | | TW 3 | | TW 4 | | | | |
| | | | 45 | 6846.QIC.001 | 301 | Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota) | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 5,425,000 | |
| | | | 46 | | 302 | Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota) | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 14,625,000 | |
| | | | 47 | | 303 | Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota) | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 6,755,000 | |
| | | | 48 | | 304 | Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota) | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 19,780,000 | |
| | | | 49 | | 401 | Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan) | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 7,125,000 | |
| | | | 50 | 6847.QIC.001 | 301 | Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 0 | 11,280,000 |
| | | | 51 | 6847.QIC.002 | 301 | Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 0 | 18,070,000 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Aktifitas | | | | REALISASI | | | | | | | | PAGU | |
|----|-------------------|-------------------|-----------|--------------|-----|---|-----------|---|------|---|------|---|------|---|------|------------|
| | | | | | | | TW 1 | | TW 2 | | TW 3 | | TW 4 | | | |
| | | | 52 | 6848.QCE.001 | 301 | Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,283,000 |
| | | | 53 | | 302 | Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,480,000 |
| | | | 54 | | 301 | Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,520,000 |
| | | | 55 | | 302 | Pengawasan logistik (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,142,000 |
| | | | 56 | | 303 | Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,800,000 |
| | | | 57 | | 401 | Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,125,000 |
| | | | 58 | | 402 | Pengawasan logistik (Kecamatan) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,600,000 |
| | | | 59 | | 501 | Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200,000 |
| | | | 60 | | 601 | Pengawasan logistik (TPS) | 0 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,250,000 |

Lampiran 2. Data Evaluasi Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 2 Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Kinerja | | | Keuangan | | | KETERANGAN |
|----|--|---|---------|-----------|-----|---------------|---------------|--------|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Pagu | Realisasi | % | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc | Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaran Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi | 6 | 5.00 | 85% | 30,023,000 | 13,882,705 | 46.24% | Jumlah Daerah yang melaksanakan Kegiatan Teknis Pengawasan sesuai dengan regulasi adalah sejumlah 5 Badan Ad-Hoc, Bawaslu Kabupaten belum dapat dilakukan klaim dikarenakan tahapan pemilu 2024 belum selesai dan Pilkada yang sementara berjalan. Untuk Tahapan Pilkada sementara belum dimasukkan dalam POK sehingga kemungkinan akan ada perubahan kinerja |
| | | Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota | 100% | 95% | 95% | 3,735,589,000 | 2,420,171,541 | 64.79% | Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, tetapi Kinerja tersebut belum termasuk jika Pemilihan dilaksanakan |



**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju Tengah**



**Laporan Kinerja Ketua Bawaslu
Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 2
Tahun 2024**

Bawaslu Mamuju Tengah bawaslu_meteng mamujutengah.bawaslu.go.id

**Cegah
Awasi
Tindak!**



**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju Tengah**



**Laporan Kinerja Ketua Bawaslu
Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 2
Tahun 2024**



Bawaslu Mamuju Tengah



bawaslu_mateng



mamujutengah.bawaslu.go.id

**Cegah
Awasi
Tindak!**